P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nurul Annisa Rahmadani[1)], Sarikadarwati[2)], Maulidia Berlianti[3)]
[1,2,3)] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: annisashaa4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui elemen-elemen yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan variabel bebas Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2023 yang diakses secara daring melalui situs resmi https://e-ppid.bpk.go.id/. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan program SPSS versi 26, yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan pendekatan pengukuran kinerja berbasis value for money, yang mencakup elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap rasio ekonomis, namun mempunyai pengaruh negatif yang signifikan kepada terhadap efisiensi dan pengaruh positif signifikan pada rasio efektivitas. Di sisi lain, variabel Belanja Modal tidak memeperlihatkan adanya pengaruh terhadap rasio ekonomis dan efektivitas, tetapi berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi. Tingkat Kekayaan tidak berpengaruh pada ketiga indikator tersebut. Secara keseluruhan, ketiga variabel hanya memberikan pengaruh signifikan pada rasio efisiensi, sedangkan pada rasio ekonomis dan efektivitas tidak terlihat adanya pengaruh.

Kata Kunci: *Dana Perimbangan, Belanja Modal, Tingkat Kekayaan, Kinerja Keuangan Daerah, Value for Money.*

Abstract

This study aims to determine the elements that influence the financial performance of district/city governments in South Sumatra Province with the independent variables of Balancing Funds, Capital Expenditures, and Wealth Level. The data for this study were obtained from the regional government financial reports (LKPD) in the form of the 2019-2023 Budget Realization Report, which was accessed online through the official website https://e-ppid.bpk.go.id/. Hypothesis testing was conducted using the SPSS version 26 program, which uses multiple linear regression analysis techniques and a value-for-money-based performance measurement approach, which includes elements of economics, efficiency, and effectiveness of public budget use. The research findings show that Balancing Funds do not affect the economic ratio, but have a significant negative effect on efficiency and a significant positive effect on the effectiveness ratio. On the other hand, the Capital Expenditures variable does not show any effect on the economic and effectiveness ratios, but has a significant positive effect on efficiency. Wealth Level does not affect the three indicators. Overall, the three variables only have a significant effect on the efficiency ratio, while there is no apparent effect on the economic and effectiveness ratios.

Keywords: *Balanced Fund, Capital Expenditure, Wealth Level, Regional Financial Performance, Value For Money.*

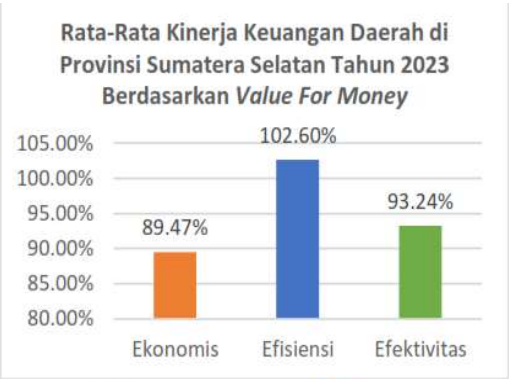
1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada 1999, pemerintah daerah di Indonesia memperoleh kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna mengurangi intervensi pemerintah pusat. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong kemandirian daerah, mempercepat pembangunan, dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi adalah administrasi keuangan daerah, berlandaskan Permendagri No. 77 Tahun 2020, administrasi ini mencakup proses mulai dari pengorganisasian untuk pengawasan, yang harus dilakukan secara teratur, jelas, dengan tetap mengedepankan tanggung jawab normatif yang berlandaskan prinsip keadilan serta orientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi kinerja pemerintah daerah penting untuk mendorong akuntabilitas dan peningkatan layanan publik. Pengukuran kinerja berfungsi menilai prestasi manajer dan unit organisasi serta sebagai kontrol terhadap kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran (Mardiasmo, 2018). Penelitian ini menggunakan metodologi *value for money*, yang mengevaluasi faktor ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Ketiga aspek ini mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan publik secara menyeluruh. Keberhasilan penerapannya bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Bastian (2014) menekankan pentingnya peran birokrat dalam menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif demi pelayanan publik yang optimal.

Disajikan dalam bagian ini suatu representasi ringkas mengenai rerata kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 berdasarkan pendekatan *value for money*.



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 1. Rata-Rata Kinerja Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Berdasarkan *Value for Money*

Gambar 1. memperlihatkan representasi rata-rata kinerja keuangan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 menunjukkan variasi capaian pada tiga aspek *value for money* (VfM). Ekonomis tercatat 89,47% (cukup ekonomis), efisiensi 102,60% (tidak efisien), dan efektivitas 93,24% (efektif). Ketimpangan ini menandakan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terhadap dana perimbangan, belanja modal, dan tingkat kekayaan daerah menjadi penting karena berperan strategis terhadap kinerja keuangan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja tidak cukup berbasis rasio keuangan, tetapi juga harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis penggunaan anggaran.

Kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini bertujuan menjamin pemerataan dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa jika dikelola secara akuntabel dan efisien, dana perimbangan dapat memperkuat kapasitas daerah dan tata kelola keuangan. Namun, ketergantungan berlebih dapat menghambat kemandirian fiskal dan efisiensi belanja.

Belanja modal juga berperan penting, sesuai PSAP No. 2 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, belanja ini harus memberi manfaat jangka panjang dan nilai tambah bagi masyarakat. Mahmudi (2021) menyebut belanja modal yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan, tetapi tanpa pengawasan berisiko menimbulkan pemborosan.

Tingkat kekayaan daerah, yang diukur melalui PAD, mencerminkan kemandirian fiskal. Menurut Mardiasmo (2018), PAD menunjukkan kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Stabilitas dan kemandirian pendapatan lebih menentukan kinerja keuangan dibanding besarnya anggaran, (Mahmudi, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Hendaris dkk., (2024) menemukan belanja modal penelitian terbukti tidak memiliki dampak substansial pada keberhasilan finansial daerah tersebut, sedangkan Wijayanti & Suryandari (2020) menemukan pengaruh signifikan. Dana perimbangan juga menunjukkan hasil berbeda; Mansur dkk., (2023) melaporkan pengaruh negatif signifikan, sementara Insani dkk., (2023) tidak signifikan. Terkait tingkat

kekayaan, Aziz & Kusumawati, (2024) menyatakan tidak berpengaruh, tetapi Primadiva dkk., (2021) menemukan pengaruh positif. Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut.

Beragam studi empiris telah dilakukan untuk menelaah bagaimana variabel dana perimbangan, belanja modal, serta tingkat kekayaan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan, khususnya yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model analisis dengan pendekatan *value for money*. Pendekatan ini menilai kinerja keuangan dalam hal ekonomi, efektivitas, dan efisiensi pada saat yang bersamaan, namun belum banyak diterapkan dalam konteks tersebut. Penelitian ini bertujuan mengisi kekurangan tersebut dengan fokus pada daerah yang kaya sumber daya alam namun masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan publik secara optimal. Perbedaan antara teori yang ada di bidang tersebut dengan situasi nyata, serta hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten, menjadi motivasi utama dilakukannya studi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pendekatan value for money yang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam menganalisis pengaruh dana perimbangan, belanja modal, serta tingkat kekayaan terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara individu maupun bersama-sama.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Dalam perspektif Teori Keagenan sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), dijelaskan adanya hubungan keagenan antara pihak prinsipal yang dalam konteks pemerintahan direpresentasikan oleh pemerintah pusat, dengan pihak agen, yaitu pemerintah daerah. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu, sehingga tercipta mekanisme delegasi kewenangan yang memungkinkan agen bertindak atas nama prinsipal tersebut. Teori ini menganggap agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan tidak selalu untuk kepentingan masyarakat (Handayani dkk., 2020). Namun, asimetri informasi sering terjadi, di mana agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal. Ini dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. (Eisenhardt, 1989).

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori keagenan dapat menjelaskan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana publik. Desentralisasi fiskal melalui pemberian dana perimbangan memungkinkan pemerintah daerah mengelola keuangan berdasarkan potensi lokalnya. Dana ini berperan sebagai instrumen pemerataan sekaligus indikator transparansi pengelolaan anggaran. Efektivitas dalam pengelolaan dana perimbangan berkorelasi secara langsung dengan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Sementara belanja modal diposisikan sebagai bentuk keputusan investasi yang berorientasi jangka panjang, menjadi salah satu indikator apakah agen mampu mengelola anggaran secara efektif demi pembangunan dan pelayanan publik (Mahmudi, 2021). Sebaliknya, tingkat kekayaan daerah seringkali diindikasikan melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan tingkat otonomi fiskal yang dimiliki suatu daerah. Akan tetapi, peningkatan kapasitas fiskal ini juga berpotensi menimbulkan risiko maladministrasi apabila tidak disertai dengan mekanisme pengelolaan yang efektif dan transparan. (Harun, 2020).

Dengan demikian, kinerja keuangan daerah berperan sebagai instrumen krusial dalam menilai tingkat keberhasilan agen dalam melaksanakan mandatnya, khususnya melalui penerapan prinsip *value for money*, yakni penggunaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif, (Mardiasmo, 2018). Kinerja yang baik menunjukkan bahwa agen bertindak profesional dan akuntabel dalam melayani kepentingan publik. Sebaliknya, kinerja yang buruk dapat menjadi sinyal adanya kelemahan dalam pengawasan, rendahnya integritas, atau perilaku oportunistik dari pihak agen, yang menunjukkan kegagalan menjalankan fungsi keagenan secara optimal.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No 77 Tahun 2020: Pedoman Teknis untuk Manajemen Keuangan Daerah, Kinerja adalah pencapaian dari melaksanakan suatu kegiatan atau program yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan anggaran, yang dapat diukur melalui indikator kuantitatif maupun kualitatif. Sementara itu, Kemampuan pemerintah daerah

dalam mengelola keuangan secara optimal tercermin dari kinerja keuangan yang mencerminkan pencapaian sasaran, visi, dan misi institusi tersebut, (Mahsun, 2013). Kinerja keuangan memiliki peran penting sebagai indikator pengukuran atas efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Berdasarkan hal tersebut, kinerja keuangan daerah dapat dipandang sebagai efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan dengan efisien dan etis, yang tercermin melalui pencapaian target penerimaan dan pengeluaran.

Untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan, organisasi memerlukan alat ukur yang dikenal sebagai pengukuran kinerja. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa mekanisme evaluasi kinerja publik adalah perangkat yang dirancang untuk membantu manajer di sektor pemerintah dalam mengevaluasi hasil organisasi menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan.

Value for Money

Value for Money, menurut Mahmudi (2021), merujuk pada penghargaan terhadap nilai yang diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan, dengan penekanan pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Konsep ini diaplikasikan sebagai tolok ukur kinerja dalam sektor publik, yang seringkali menghadapi tantangan terkait ketidakefisienan dan potensi pemborosan. Oleh karenanya, implementasi *value for money* menjadi krusial, terutama dengan menitikberatkan pada dimensi ekonomi, efisiensi, serta efektivitas dalam pengelolaan dana publik.

Ukuran *value for money* secara konseptual terbagi dua kelompok utama, yaitu: pertama, indikator yang berkaitan dengan pengelolaan biaya, meliputi aspek ekonomis dan efisiensi; dan kedua, indikator yang menilai kualitas pelayanan, yang diwakili oleh efektivitas. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan proporsional antara sumber daya yang digunakan termasuk tenaga kerja, remunerasi, serta biaya administrasi dengan output atau hasil kerja yang diperoleh oleh tim atau organisasi. Diungkapkan secara berbeda, efisiensi mengukur seberapa optimal input tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan keluaran. Di sisi lain, indikator efektivitas berfokus pada penilaian terhadap capaian hasil dan dampak yang terjadi (outcome) sebagai akibat dari output program, khususnya dalam konteks pencapaian tujuan yang telah dirancang dalam suatu program atau kegiatan. Aspek ini mencerminkan kualitas serta keberhasilan suatu program dalam memenuhi sasaran yang diharapkan.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan, yang kini dikenal sebagai Transfer ke Daerah (TKD), merupakan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyediakan pendanaan untuk pengeluaran negara. Dengan merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Republik Indonesia mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, TKD dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai sarana memberikan bantuan keuangan untuk pelaksanaan urusan yang dikelola oleh daerah. Kebijakan tersebut sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan maksud untuk mempertahankan keseimbangan finansial antara otoritas pusat serta daerah. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah tiga komponen utama dari dana perimbangan, sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022.

Dana Bagi Hasil

Salah satu elemen dari Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), didistribusikan sesuai dengan pencapaian kinerja pemerintah daerah dan persentase pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama DBH adalah untuk menutup disparitas anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik yang merupakan penghasil maupun non-penghasil sumber daya. DBH diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yakni penerimaan yang bersumber dari sektor perpajakan meliputi Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penerimaan yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, seperti batubara, mineral, minyak dan gas bumi, energi panas bumi, kehutanan, dan perikanan.

Dana Alokasi Umum

Transfer ke Daerah (TKD) mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) disalurkan oleh pemerintah pusat guna mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan

publik antardaerah. Alokasinya didasarkan pada perhitungan kebutuhan fiskal dan biaya standar pelayanan minimum masing-masing daerah. DAU berperan sebagai instrumen pemerataan agar seluruh daerah, tanpa memandang kapasitas fiskalnya, tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Pada dasarnya, Pemerintah daerah dengan sumber daya keuangan yang substansial namun memiliki kewajiban pengeluaran yang relatif kecil cenderung menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah yang lebih rendah, sementara daerah dengan potensi fiskal rendah dan kebutuhan besar akan mendapatkan DAU yang lebih besar.

Dana Alokasi Khusus

Salah satu elemen dari Transfer ke Daerah (TKD) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana dialokasikan oleh pemerintah pusat guna mendanai program-program atau kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. Tujuan utama DAK adalah untuk memperkuat penyelenggaraan layanan publik melalui pemanfaatan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara garis besar, DAK diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni: DAK fisik yang difokuskan pada pembangunan fasilitas dan infrastruktur publik; DAK nonfisik yang diperuntukkan bagi pembiayaan operasional layanan publik; serta hibah daerah yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan fisik maupun pelayanan tertentu.

Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai belanja anggaran pemerintah yang ditujukan untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi selama beberapa periode akuntansi, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 03 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pengeluaran ini mencakup pembuatan tanah, pembangunan infrastruktur, pembelian perlengkapan, serta perolehan aset tidak berwujud. Selaras dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa belanja daripada modal ditujukan sebagai mendukung penyediaan sarana dan prasarana publik jangka panjang yang memiliki nilai strategis dalam menunjang pelayanan pemerintahan.

Menurut Halim & Kusufi (2012), pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, berkontribusi terhadap percepatan aktivitas ekonomi. Peningkatan dalam hal efisiensi dan efektivitas selama proses distribusi barang dan jasa berperan penting dalam memperkuat keterhubungan antarwilayah serta mengoptimalkan kelancaran arus aktivitas ekonomi. Kondisi ini memungkinkan terjadinya sinergi yang lebih baik dalam mobilisasi sumber daya dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Dengan berlandaskan Peraturan No. 77 Tahun 2020 dari Menteri Dalam Negeri, klasifikasi belanja modal terbagi menjadi beberapa kelompok utama. Pertama, belanja tanah yang mencakup pengadaan dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan. Kedua, belanja peralatan dan mesin yang meliputi pembelian berbagai perangkat dan mesin penunjang operasional pemerintah daerah. Ketiga, belanja bangunan dan mesin yang berkaitan dengan konstruksi dan pengadaan fasilitas fisik. Keempat, belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang mencakup pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur transportasi dan sarana pengairan. Kelima, belanja aset tetap lainnya yang meliputi pengeluaran untuk aset-aset permanen selain yang telah disebutkan sebelumnya. Terakhir, belanja aset lainnya yang mencakup pengeluaran untuk aset non-permanen atau aset yang tidak termasuk kategori utama tersebut.

Tingkat Kekayaan

Tingkat kekayaan diproksikan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, yang mana kajian berikut direpresentasikan oleh total PAD tiap daerah (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD merupakan bagian yang signifikan dari pendapatan daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemungutan PAD dilakukan menurut peraturan daerah yang dirumuskan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Fungsi utama PAD ialah memperkokoh kemandirian fiskal wilayah, memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan otonomi

dengan memanfaatkan potensi serta karakteristik khusus wilayah masing-masing.

Oleh karenanya, PAD tidak sekadar menjadi sumber pendapatan, tetapi juga berperan strategis sebagai instrumen dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan lokal, (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020). Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31, PAD berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda, dan sumber pendapatan sah lainnya.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah pusat mentransfer sumber daya anggaran ke pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi. Dalam praktiknya, meskipun dana ini bertujuan mendukung pembiayaan daerah, terdapat kecenderungan munculnya ketergantungan fiskal yang berpotensi menurunkan motivasi daerah dalam mengelola pendapatan asli secara mandiri. Dalam kerangka evaluasi kinerja keuangan yang mengacu pada elemen daripada *value for money*, penekanan diberikan pada elemen efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan serta pengelolaan anggaran, dana perimbangan sering kali dinilai tidak memberikan hasil yang optimal.

Studi yang dilakukan oleh Insani dkk., (2023) mengindikasikan bahwa dana perimbangan berkontribusi secara negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian juga mendukung kesimpulan Mansur dkk., (2023) serta Lestari & Nurkhin (2023), yang menunjukkan dampak negatif signifikan pengalokasikan uang untuk kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian Dasmar dkk., (2020) memberikan hasil berbeda, dimana dana perimbangan justru memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan, tergantung pada efektivitas pemanfaatan dana tersebut oleh pemerintah suatu daerah.

H_1 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan pendekatan *Value for Money* yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada perolehan aset tetap termasuk pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai manfaat jangka panjang, serta berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Dari sudut pandang *value for money*, pelaksanaan belanja modal yang ideal harus mencerminkan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan efektivitas dalam pencapaian sasaran pembangunan. Namun demikian, efektivitas dan efisiensi belanja modal sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Analisis yang dilakukan dalam penelitian oleh Hendaris dkk., (2024) dan Insani dkk., (2023) memperlihatkan bahwa belanja modal memiliki sedikit dampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal berikut mungkin disebabkan oleh proses pengadaan yang lambat atau proyek yang belum memberikan manfaat langsung terhadap keuangan daerah. Sebaliknya, Lestari & Nurkhin (2023) menemukan karena kinerja keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh belanja modal, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja modal yang efektif mampu meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan suatu daerah.

H_2 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan pendekatan *Value for Money* yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Pengaruh Tingkat Kekayaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Tingkatan suatu kekayaan sebuah daerah menunjukkan seberapa baik suatu saja daerah mengelola dan memanfaatkan potensi ekonominya, terutama dalam hal menghasilkan PAD. Sumber daya alam, aset tetap milik, dan bentuk kekayaan lainnya yang dapat membantu pembiayaan pembangunan termasuk dalam kategori kekayaan daerah. Kenaikan tingkat kekayaan suatu daerah cenderung membuka potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana pusat, serta meningkatkan kapasitas

daerah dalam membiayai pengeluaran publik secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam kerangka *value for money*, pengelolaan kekayaan daerah idealnya dilakukan secara ekonomis, yaitu dengan memperoleh sumber daya pada biaya yang paling minimal tanpa mengorbankan kualitas; efisien, dalam arti memaksimalkan output dari input yang tersedia; dan efektif, yakni pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan daerah tidak hanya dilihat dari besarnya aset yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana aset tersebut dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan menghasilkan manfaat fiskal nyata bagi pemerintah daerah.

Menurut penelitian oleh Primadiva dkk., (2021), kinerja keuangan daerah yang diproksikan melalui persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari tingkat kekayaan daerah terhadap total pendapatan daerah. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Dasmar dkk., (2020), yang menyimpulkan bahwa peningkatan kekayaan daerah berkontribusi secara nyata dalam memperbaiki jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali terkait dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diperoleh. Namun, penelitian oleh Wijayanti & Suryandari (2020) menegaskan bahwa pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak signifikan secara statistik. Ini bisa jadi karena kurang optimalnya pengelolaan potensi daerah serta rendahnya tingkat inovasi dalam upaya penggalian PAD di beberapa wilayah.

H_3 : Tingkat Kekayaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan pendekatan *Value for Money* yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hipotesis dirumuskan untuk mengevaluasi dampak substansial yang dimiliki tingkat kekayaan, pengeluaran modal dan dana cadangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ditinjau secara parsial dan simultan.

H_4 : Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan pendekatan *Value for Money* yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan landasan epistemologi positivisme sebagai kerangka teori untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian yang telah dirancang secara terstruktur, dan analisis data memanfaatkan teknik statistik yang dapat diukur. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Dana Perimbangan (X1), Belanja Modal (X2), dan Tingkat Kekayaan (X3), sementara variabel dependen yang menjadi fokus adalah Kinerja keuangan wilayah tersebut (Y). Data deret waktu adalah jenis data yang digunakan yang mencakup rentang tahun 2019 hingga 2023.

Populasi dan Sampel

Semua pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam studi ini untuk periode 2019–2023. Sampel ditentukan dengan teknik *sampling* jenuh, yaitu menggunakan seluruh anggota populasi karena jumlahnya terbatas dan memiliki keseragaman karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, unit analisis meliputi 17 pemerintah kabupaten/kota selama 5 tahun, menghasilkan total 85 data observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini mengadopsi regresi linier berganda yang dijalankan menggunakan SPSS versi 26, dengan tahapan berupa pengujian asumsi klasik, pengembangan model regresi, pengujian signifikansi parsial melalui uji t, evaluasi pengaruh simultan variabel independen menggunakan uji F, serta penilaian koefisien determinasi (R^2) dari kapasitas model untuk menjelaskan variasi data.

Persamaan model regresi linier berganda yang menjadi acuan analisis dapat dirumuskan berikut:

Model 1 :

$$Y1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Model 2 :

$$Y2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Model 3 :

$$Y3 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y1 : Rasio Ekonomis
Y2 : Rasio Efisiensi
Y3 : Rasio Efektivitas
X1 : Dana Perimbangan
X2 : Belanja Modal
X3 : Tingkat Kekayaan
α : Konstanta
β_1 β_2 β_3 : Koefisien Regresi
e : *Error*

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel di bawah ini memuat hasil pengolahan data menggunakan model regresi linier berganda.

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda Model 1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.472	.562		6.182	.000
	DP	.068	.036	.413	1.897	.061
	BM	-.004	.027	-.030	-.159	.874
	TK	-.029	.015	-.345	-1.918	.059

a. Dependent Variable: Kinerja_Ekonomis

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 1. melalui bagiana B dari *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan bentuk rumusan dari representasi persamaan dalam regresi linier berganda:

$$Y = 3{,}472 + 0{,}68X_1 - 0{,}004X_2 - 0{,}029X_3$$

Hasil persamaan regresi menunjukkan konstanta sebesar 3,472, yang berarti ketika Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan bernilai nol, Kinerja Keuangan Daerah (rasio ekonomis) diperkirakan sebesar 3,472. Koefisien Dana Perimbangan positif sebesar 0,68, mengindikasikan setiap kenaikan satu satuan akan, jika semua faktor lain tetap sama, meningkatkan kinerja sebesar 0,68. Akan tetapi kebalikanya, Belanja Modal memiliki koefisien negatif -0,004 dan Tingkat Kekayaan -0,029, yang berarti setiap kenaikan masing-masing variabel tersebut akan menurunkan kinerja sebesar nilai koefisiennya dalam kondisi variabel lain tidak berubah.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda Model 2

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	4.763	.537		8.866	.000
DP	-.095	.034	-.577	-2.769	.007
BM	.091	.026	.633	3.493	.001
TK	.001	.014	.015	.085	.933

a. Dependent Variable: KInerja Efisiensi

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2, hasil pengolahan data mengindikasikan bahwa. melalui bagian B *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan bentuk persamaan daripada regresi linear berganda yang diformulasikan berikut:

$$Y = 4{,}763 - 0{,}095X_1 + 0{,}091X_2 + 0{,}001X_3$$

Hasil persamaan regresi menunjukkan konstanta sebesar 4,763, yang berarti apabila Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan bernilai nol, maka Kinerja Keuangan Daerah (rasio efisiensi) diperkirakan sebesar 4,763. Koefisien Dana Perimbangan bernilai negatif –0,095, yang mengindikasikan setiap kenaikan satu satuan akan, jika semua faktor lainnya tetap sama, mengurangi kinerja sebesar 0,095. Sebaliknya, Belanja daripada Modal memiliki koefisien positif 0,091 dan tingkat kekayaan 0,001, yang berarti bahwa setiap kenaikan dalam setiap variabel tersebut akan meningkatkan kinerja sebesar nilai koefisiennya dalam kondisi variabel independen lain tidak berubah.

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda Model 3

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	2.775	.684		4.055	.000
DP	.101	.044	.495	2.306	.024
BM	-.006	.033	-.032	-.172	.864
TK	-.033	.018	-.319	-1.802	.075

a. Dependent Variable: KInerja_Efektivitas

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 3. melalui bagian B *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan bentuk persamaan regresi linear berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = 2{,}775 + 0{,}101\ X_1 - 0{,}006X_2 - 0{,}033X_3$$

Hasil persamaan regresi menunjukkan konstanta sebesar 2,775, yang berarti ketika Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan bernilai nol, Kinerja Keuangan Daerah (rasio efektivitas) diperkirakan sebesar 2,775. Dengan nilai positif sebesar 0.101, Koefisien Dana Perimbangan

berarti bahwa, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, kinerja akan meningkat sebesar 0.101 untuk setiap peningkatan unit. Namun, koefisien negatif untuk belanja modal adalah -0.006 serta Tingkat Kekayaan –0,033, yang mengindikasikan setiap kenaikan masing-masing variabel tersebut akan menurunkan kinerja sebesar nilai koefisiennya dalam kondisi variabel lain tidak berubah.

Hasil Uji Parsial (t)

Hasil uji parsial (t) tergambar di tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji t Model 1

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	3.472	.562		6.182	.000
DP	.068	.036	.413	1.897	.061
BM	-.004	.027	-.030	-.159	.874
TK	-.029	.015	-.345	-1.918	.059

a. Dependent Variable: Kinerja_Ekonomis

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui analisis parsial (uji t), diperoleh uraian sebagai berikut:

1. Variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,068, nilai signifikansi sebesar 0,061 yang menunjukkan deviasi di atas batas signifikansi 0,05, sementara nilai t hitung sebesar 1,897 masih berada di bawah nilai ambang t tabel sebesar 1,98969. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh dana perimbangan ketika diukur melalui rasio ekonomis.
2. Variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi -0,004, poin *t-hitung* -0,159 yang lebih rendah apabila dirujuk pada nilai t-tabel 1,98969 serta signifikansi 0,874 yang melebihi ambang 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan pengukuran rasio ekonomis.
3. Variabel Tingkat Kekayaan mencatat koefisien regresi -1,918, dengan nilai *t-hitung* 0,239 yang berada di bawah tingkat probabilitas sebesar 0,059 yang melampaui kriteria signifikansi 0,05 dan *t-tabel* 1.98969. Temuan ini menunjukkan bahwa, berdasarkan rasio ekonomi, tingkat kekayaan tidak memiliki dampak yang jelas terhadap kinerja keuangan regional.

Tabel 5. Hasil Uji t Model 2

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	4.763	.537		8.866	.000
DP	-.095	.034	-.577	-2.769	.007
BM	.091	.026	.633	3.493	.001
TK	.001	.014	.015	.085	.933

a. Dependent Variable: KInerja_Efisiensi

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hasil spesifik dari analisis parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai t-statistik sebesar -2,769 dan koefisien regresi sebesar -0,095. Nilai ini memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,007, yang berada di bawah ambang signifikansi 0,05, dan kurang dari nilai t kritis dalam tabel, yang adalah 1,98969. Berdasarkan metrik rasio efisiensi, hasil ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memberikan implikasi negatif yang signifikan terhadap capaian kinerja keuangan daerah. Artinya, peningkatan Dana Perimbangan berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara statistik signifikan.

2. Nilai t dari hasil analisis untuk variabel Belanja Modal mencapai 3,493, melebihi batas t-table sebesar 1,98969, dan ditemukan koefisien regresi positif sebesar 0,091. Selain itu, hasil di bawah batas 0,05 ditampilkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Temuan ini mendukung ide bahwa belanja modal memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan indikator efisiensi. Dengan kata lain, peningkatan belanja modal di daerah berhubungan dengan perbaikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
3. Sementara itu, variabel Tingkat Kekayaan menunjukkan koefisien regresi yang sangat kecil, yakni 0,001, dimana nilai tabel t sebesar 1.98969 tidak tercapai oleh nilai statistik t sebesar 0.085. Selain itu, nilai signifikansi yang dilaporkan sebesar 0.933 jauh lebih tinggi daripada batas 0.05. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan regional tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kekayaan pada aspek efisiensi. Dengan kata lain, perubahan dalam tingkat kekayaan daerah tidak secara statistik berdampak berarti pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 6. Hasil Uji t Model 3

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	2.775	.684		4.055	.000
DP	.101	.044	.495	2.306	.024
BM	-.006	.033	-.032	-.172	.864
TK	-.033	.018	-.319	-1.802	.075

a. Dependent Variable: KInerja_Efektivitas

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Berdasarkan temuan dari pengujian hipotesis dengan analisis parsial (*uji t*), diperoleh uraian temuan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Perimbangan memperlihatkan koefisien regresi positif sebesar 0,101, dengan statistik t sebesar 2,306 yang melampaui nilai kritis nilainya adalah 1.98969 di tabel t. Selain itu, tingkat signifikansi yang tercatat adalah 0.024, di bawah ambang batas 0.05. Ini menunjukkan bahwa Dana Penyeimbang memberikan kontribusi yang substansial dan merefleksikan hubungan yang bersifat positif terhadap kinerja keuangan daerah jika diukur menggunakan rasio efektivitas. Secara konseptual, peningkatan dana perimbangan secara statistik berimplikasi pada peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Sebaliknya, variabel Belanja Modal menampilkan nilai t sebesar -0,172 dan koefisien regresi negatif sebesar -0,006 yang tidak mencapai nilai kritis t-tabel 1,98969, serta nilai signifikansi sebesar 0,864 yang jauh melampaui batas 0,05. Hasil ini mengafirmasi bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan indikator rasio efektivitas. Artinya, perubahan dalam belanja modal tidak secara statistik mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada sampel yang diteliti.
3. Untuk variabel Tingkat Kekayaan, diperoleh koefisien regresi negatif sebesar -0,033 dengan nilai t-tabel 1.98969 masih lebih tinggi daripada nilai t -1.802. Selain itu, tingkat signifikansi yang diukur sebesar 0.075 lebih tinggi daripada ambang 0.05 untuk signifikansi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa variabel Tingkat Kekayaan tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan daerah tersebut ketika menggunakan rasio efektivitas sebagai indikatornya. Dengan demikian, fluktuasi tingkat kekayaan daerah tidak secara statistik berkorelasi dengan perubahan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Uji Simultan (F)

Tabel di bawah ini menampilkan hasil uji simultan (F).

Tabel 7. Hasil Uji F Model 1

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.024	3	.008	1.702	.173[b]
Residual	.380	81	.005		
Total	.404	84			

a. Dependent Variable: Kinerja_Ekonomis
b. Predictors: (Constant), TK, BM, DP

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Berdasarkan data yang tercantum nilai F yang dihitung sebesar 1.702 dengan tingkat signifikansi 0.173 ditampilkan dalam Tabel 7. saat uji F digunakan secara bersamaan. Nilai F tersebut lebih rendah dibandingkan F tabel sebesar 2,72, sementara nilai signifikansi melebihi batas 0,05. Dimana menandakan jika secara kolektif, variabel Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan ketika

dievaluasi menggunakan rasio ekonomi, hal itu tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 8. Hasil Uji F Model 2

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.056	3	.019	4.334	.007[b]
Residual	.348	81	.004		
Total	.404	84			

a. Dependent Variable: KInerja_Efisiensi
b. Predictors: (Constant), TK, BM, DP

Sumber: Output data diolah SPSS 2026 (2025)

Uji F menghasilkan nilai F yang dihitung sebesar 4,334 dengan tingkat signifikansi 0,007 berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 8. Tingkat signifikansi berada di bawah ambang 0,05, namun nilai F yang dihitung lebih tinggi daripada nilai F tabel sebesar 2,72. Dengan demikian, rasio efisiensi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Tabel 9 Hasil Uji F Model 3

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.053	3	.018	2.550	.061[b]
Residual	.564	81	.007		
Total	.618	84			

a. Dependent Variable: KInerja_Efektivitas
b. Predictors: (Constant), TK, BM, DP

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Berdasarkan pengujian simultan (uji F) Dengan tingkat signifikansi 0,061, nilai F yang dihitung adalah 2,550, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 9. Nilai F hitung ini masih di bawah nilai kritis F tabel sebesar 2,72, sedangkan nilai signifikansi melampaui batas 0,05. Hasil ini secara kolektif merefleksikan bahwa tingkat kekayaan, belanja modal, dan dana perimbangan tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dalam kerangka pengukuran rasio efektivitas.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut, hasil uji koefisien determinasi (R^2) memberikan gambaran mengenai kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.244[a]	.059	.024	.06852

a. Predictors: (Constant), TK, BM, DP
b. Dependent Variable: Kinerja_Ekonomis

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Nilai R Square yang Disesuaikan sebesar 0,024, atau 2,4%, ditampilkan dalam Tabel 10, menunjukkan bahwa variabilitas Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan rasio ekonomis hanya sebagian kecil dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tingkat kekayaan, belanja modal, dan dana perimbangan. Dengan demikian, sebesar 97,6% variasi kinerja tersebut dipengaruhi oleh variabel luar tambahan yang tidak termasuk dalam model studi ini. Temuan ini menegaskan perlunya penyelidikan terhadap variabel tambahan yang mungkin memengaruhi kinerja keuangan daerah agar model yang digunakan dapat lebih komprehensif dan akurat.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.372[a]	.138	.106	.06553

a. Predictors: (Constant), TK, BM, DP
b. Dependent Variable: KInerja_Efisiensi

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Tabel 11 memperlihatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,106 atau 10,6% adalah setara. Angka ini menunjukkan jikalau sekitar 10,6% dari variasi dalam rasio efisiensi digunakan untuk menilai keberhasilan keuangan wilayah tersebut dapat dijelaskan oleh perubahan pada tiga variabel independen Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Tingkat Kekayaan. Sebaliknya, sebagian besar yakni 89,4% dinamika kinerja keuangan daerah tidak sepenuhnya dijelaskan oleh model, melainkan juga dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut dalam studi berikutnya.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 3

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.294[a]	.086	.052	.08347

a. Predictors: (Constant), TK, BM, DP
b. Dependent Variable: KInerja_Efektivitas

Sumber: Hasil analisis data SPSS versi 26 (2025)

Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan semuanya berkontribusi terhadap penjelasan variasi dalam Kinerja Keuangan Regional, seperti yang ditunjukkan oleh nilai R Square yang Disesuaikan pada Tabel 12 sebesar 0,052, atau 5,2% berdasarkan rasio efektivitas relatif terbatas. Dengan demikian, sebagian besar, yakni 94,8% dari perubahan kinerja keuangan daerah masih terpengaruh oleh elemen tambahan yang tidak termasuk dalam penyelidikan ini. Dimana ini menegaskan kebutuhan akan pengembangan model penelitian yang lebih luas dan inklusif untuk menangkap berbagai determinan kinerja keuangan daerah secara lebih komprehensif.

Pembahasan

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Peranan transfer dana perimbangan dalam merefleksikan capaian kinerja keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh hasil uji t parsial di Provinsi Sumatera Selatan dianalisis melalui tiga pendekatan model, yaitu rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pada model yang menggunakan rasio ekonomis sebagai indikator, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,061, di atas ambang 0,05, dan nilai t sebesar 1,897, di bawah nilai tabel t sebesar 1,98969 menunjukkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) pada model ini ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauziah dan Ekaningtias (2022) serta Insani dkk., (2023), Ini menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan tidak menjamin pengelolaan anggaran yang hemat, karena sebagian besar penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis lebih dipengaruhi oleh proses pengadaan, perencanaan anggaran, dan kemampuan negosiasi harga dibandingkan dengan besar kecilnya dana yang diterima.

Pada model kedua dengan indikator rasio efisiensi, T-countnya adalah -2,769, dan tingkat signifikansinya adalah 0,007 < 0,05. Ini menunjukkan dampak negatif yang substansial, yang berarti bahwa kenaikan dana perimbangan cenderung berdampak pada penurunan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama (H_1) pada model ini diterima. Hasil penelitian ini mengafirmasi temuan Lestari & Nurkhin (2023) dan Insani dkk. (2023), yang menyoroti kecenderungan ketergantungan yang tinggi terhadap distribusi dana yang berasal daripada pemerintah yang di pusat kerap kali mengurangi dorongan dan inisiatif pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber PAD secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya upaya inovatif serta strategi penggalian potensi lokal yang seharusnya dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Akibatnya, motivasi untuk mengembangkan basis pendapatan mandiri menjadi terbatas, yang pada akhirnya berdampak negatif pada penguatan keuangan daerah secara menyeluruh. Selain itu, kurangnya perencanaan dan pengawasan penggunaan dana dapat mengakibatkan pemborosan dan belanja yang tidak produktif.

Pada model ketiga dengan indikator rasio efektivitas, tingkat signifikansi adalah 0,024 < 0,05 dan nilai t-hasil adalah 2,306 > t-tabel menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis pertama (H_1) pada model ini diterima. Temuan ini beresonansi dengan hasil penelitian Padang (2023) serta Dasmar dkk. (2020), yang menggarisbawahi bahwa dana perimbangan dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan keuangan daerah, terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas. Dana perimbangan berperan dalam mendukung pembiayaan program prioritas, sehingga realisasi target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil uji t parsial di Provinsi Sumatera Selatan dianalisis menggunakan tiga model berbeda, yakni rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pada model pertama yang menggunakan rasio ekonomis sebagai ukuran kinerja, nilai t-table esensial sebesar 1.98969 lebih tinggi daripada nilai t yang dihitung sebesar -0.159. Selain itu, tingkat signifikansi adalah 0.874, yang lebih tinggi dari batas 0.05. Hipotesis kedua (H2)

dalam model ini ditolak karena temuan ini, yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak memberikan kontribusi yang secara substansial memengaruhi kinerja keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Insani dkk., (2023), Padang (2023), dan Hendaris dkk., (2024) yang mengungkapkan bahwa alokasi belanja modal tidak selalu berdampak langsung pada efisiensi ekonomi. Hal ini disebabkan karakter belanja modal yang berorientasi pada yang merepresentasikan investasi jangka panjang, sehingga kontribusi manfaatnya belum terinternalisasi dalam efisiensi biaya saat ini. Selain itu, rasio ekonomis lebih menitikberatkan pada efisiensi pengadaan barang/jasa, sedangkan belanja modal berkaitan dengan penciptaan aset tetap. Oleh karena itu, tingginya belanja modal tidak serta-merta mencerminkan kinerja ekonomis yang baik, terutama jika tidak didukung perencanaan dan pengendalian biaya yang optimal.

Pada model kedua dengan indikator rasio efisiensi, nilai t-hitung 3,493 > t-tabel 1,98969 dan indikasi 0,001 < 0,05 menunjukkan pengaruh positif signifikan, sehingga H_2 diterima. Hasil ini sejalan dengan Lestari & Nurkhin (2023) serta Wijayanti & Suryandari (2020) bahwa belanja modal yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui penyediaan aset dan infrastruktur yang menunjang operasional pemerintahan. Sarana prasarana memadai membuat pelayanan publik lebih efektif dan hemat biaya, sementara perencanaan belanja modal yang baik mencegah pemborosan jangka panjang.

Pada model ketiga yang menggunakan rasio efektivitas sebagai indikator utama dalam menilai kinerja dalam dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah, hasil evaluasi statistik mengindikasikan nilai t-hitung sebesar -0,172 ini secara signifikan lebih rendah daripada nilai kritis t-tabel yang bernilai 1,98969. Dalam kaitan ini, besaran signifikansi yang diperoleh mencapai 0,864, yang melewati batas 0,05 adalah tingkat signifikansi standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam kinerja keuangan regional tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengeluaran modal apabila diukur melalui indikator efektivitas. Oleh karenanya, hipotesis kedua (H_3) yang mengusulkan dikarenakan model ini menolak gagasan bahwa belanja modal memiliki dampak pada kinerja keuangan daerah, mereka tidak berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah sepanjang periode studi. Hasil ini konsisten dengan hasil studi lain dari Lestari & Nurkhin (2023) dan Hendaris dkk., (2024)yang menegaskan bahwa manfaat belanja modal yang bersifat jangka panjang belum sepenuhnya tercermin dalam pencapaian target pada periode anggaran berjalan. Selain itu, belanja modal tidak selalu berdampak langsung terhadap output pelayanan publik, terutama apabila aset yang dihasilkan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, tingginya belanja modal belum tentu meningkatkan efektivitas kinerja keuangan secara signifikan.

Pengaruh Tingkat Kekayaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dampak tingkat kekayaan terhadap kinerja keuangan daerah ditentukan oleh hasil uji t parsial di Provinsi Sumatera Selatan dianalisis melalui tiga model, yaitu rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pada model pertama dengan indikator rasio ekonomis, Hipotesis ketiga (H3) ditolak karena nilai t sebesar 0.239 < t-tabel sebesar 1.98969 dan tingkat signifikansi 0.059 > 0.05 menggambarkan bahwa tingkat kekayaan tidak berkontribusi secara substansial dalam membentuk kinerja keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan Wijayanti & Suryandari (2020) menegaskan jikalau besarnya kekayaan daerah tidak menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Rasio ekonomis mengukur ketepatan dan penghematan pengeluaran, sedangkan tingkat kekayaan lebih menunjukkan potensi ekonomi. Oleh karena itu, PAD tinggi tidak menjamin kinerja ekonomis yang baik jika pengeluaran tidak efisien dan terencana.

Pada model kedua dengan indikator rasio efisiensi, tidak ada pengaruh yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai t-count sebesar 0.085 < t-table 1.98969 dan signifikansi 0.933 > 0.05, sehingga H_3 kembali ditolak. Temuan ini sejalan dengan Aziz & Kusumawati (2024) bahwa besarnya PAD tidak menjamin penggunaan anggaran yang efisien. Efisiensi lebih ditentukan oleh tata kelola, perencanaan, dan pengendalian belanja yang baik. Tanpa pengelolaan optimal, kekayaan daerah tidak berdampak pada peningkatan efisiensi kinerja keuangan.

Pada model ketiga dengan indikator rasio efektivitas, H_3 sekali lagi ditolak karena nilai t sebesar -1.802 < t-tabel 1.98969 dan

signifikansi 0.075 > 0.05 mengindikasikan bahwa tingkat kekayaan tidak memperlihatkan diferensiasi pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan koherensi dengan kajian Wijayanti & Suryandari (2020) dan Tiara Sedek & Kusumawati (2024) bahwa efektivitas lebih dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan komitmen pemerintah daerah dalam mengarahkan kekayaan untuk tujuan strategis. Tanpa pemanfaatan yang tepat, kekayaan daerah tidak memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan kinerja keuangan.

Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan temuan pengujian simultan (uji F) pada model pertama dengan variabel indikator rasio ekonomis menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,702 berada di tingkat signifikansi 0,173 di atas kriteria 0,05, ini berada di bawah nilai kritis tabel F sebesar 2,72. Oleh karena itu, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hipotesis keempat (H_4) ditolak. Nilai R^2 sebesar 2,4% menunjukkan variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil variasi kinerja, sedangkan 97,6% dipengaruhi faktor lain seperti tata kelola, kapasitas SDM, pengawasan, dan kebijakan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomis tidak semata ditentukan oleh besaran dana dan aset, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan keuangan. Ketergantungan tinggi pada dana perimbangan dapat mengurangi dorongan efisiensi mandiri.

Pada model kedua dengan indikator rasio efisiensi, nilai F hitung sebesar 4,334 melebihi Tabel F 2.72, yang terletak di bawah *cut-off* signifikansi 0,05 dengan nilai p sebesar 0,007. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel secara kolektif bersama-sama memberikan dampak substansial pada kinerja keuangan wilayah tersebut. Oleh karena itu, mungkin untuk mengadopsi hipotesis keempat (H4). Nilai R^2 sebesar 10,6% menunjukkan kontribusi terbatas, namun Dana Perimbangan membantu kebutuhan operasional, Belanja Modal membentuk aset produktif, dan Tingkat Kekayaan memberi fleksibilitas anggaran. Jika dikelola optimal, ketiganya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari & Nurkhin (2023) dan Insani dkk., (2023).

Pada model ketiga dengan indikator rasio efektivitas, nilai F hitung sebesar 2,550 berada di bawah dengan tingkat signifikansi 0,061, nilai F dari tabel 2,72 lebih besar daripada ambang 0,05. Dengan mempertimbangkan hasil simultan, ketiga variabel tidak mencerminkan dampak yang favorable terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis keempat (H4) dinyatakan tidak terdukung. Nilai R^2 sebesar 5,2% menunjukkan rendahnya kontribusi variabel independen terhadap pencapaian target penerimaan, yang lebih dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengelolaan dana, perbedaan karakteristik daerah, dan keterbatasan pengawasan. Efektivitas lebih ditentukan oleh manajemen dan perencanaan keuangan daripada sekadar besaran dana atau aset.

Secara keseluruhan, hasil uji simultan mengindikasikan bahwa variabel Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan memberikan pengaruh yang beragam terhadap kinerja keuangan daerah tergantung pada aspek pengukuran yang digunakan. Hanya pada aspek efisiensi, ketiga variabel tersebut menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam tercermin dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini merefleksikan bahwa selain variabel-variabel berbasis data kuantitatif, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengendalian internal, transparansi dalam pertanggung jawaban, serta efektivitas mekanisme pengawasan yang dijalankan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan dana dan peningkatan tata kelola fiskal menjadi kunci utama dalam memperkuat kinerja keuangan keseluruhan di wilayah tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan akumulasi temuan empiris dan hasil kajian komprehensif terkait variabel dana perimbangan, belanja modal, dan tingkat kekayaan terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendekatan value for money yang menitikberatkan pada efektivitas, efisiensi, serta ekonomis, dapat disusun simpulan sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan menunjukkan tidak ada dampak substansial pada keberhasilan finansial daerah tersebut apabila diukur

melalui rasio ekonomis. Namun, variabel ini justru memberikan pengaruh negatif penting untuk kesuksesan finansial daerah berdasarkan pengukuran menggunakan rasio efisiensi, serta pengaruh positif yang signifikan jika ditinjau dari rasio efektivitas.
2. Belanja Modal menurut indikator rasio ekonomi, modal tidak memiliki pengaruh yang jelas terhadap keberhasilan keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, variabel ini mengambarkan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efisiensi, namun tidak memiliki pengaruh signifikan jika diukur menggunakan rasio efektivitas.
3. Tingkat Kekayaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan dari sebuah daerah pada ketiga indikator pengukuran yang digunakan, baik ekonomis, efisiensi, maupun efektivitas.
4. Secara simultan, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kekayaan tidak memberikan pengaruh signifikan memiliki dampak besar pada kinerja keuangan regional yang diukur dengan rasio efisiensi; pada kinerja keuangan regional yang diukur dengan rasio ekonomi; serta tidak memberikan pengaruh signifikan pada rasio efektivitas.

Saran

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut berdasarkan kesimpulan yang telah disediakan;

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dana perimbangan terealisasi tepat waktu dan mengoptimalkan dalam mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan.
2. Pemerintah daerah diharapkan memperbaiki perencanaan dan pengawasan belanja modal agar alokasi anggaran lebih fokus pada proyek prioritas yang mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.
3. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar pengelolaan dana berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Penelitian ini menggunakan data hingga tahun 2023 sesuai dengan ketersediaan data pada saat penelitian dilakukan. Dengan merujuk pada keterbatasan tersebut, penelitian yang akan datang diharapkan menggunakan data yang lebih up to date. Lebih jauh, disarankan pula untuk memperluas cakupan variabel dengan menambahkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan daerah serta menggunakan metode penelitian campuran guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Amin Insani, Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, *6*(1), 109–125.

Aziz, A. A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 6984–6995.

Bastian, I. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Medika.

Budi, R. B. H., & Sastradipraja, U. (2024). Analysis of Factors Affecting Local Government Financial Performance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, *5*(5), 5399–5410.

Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah,, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, *16*(2), 39.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?. *https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah* (diakses 20 Juni 2025).

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, *14*(1), 57.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba

Empat.

Handayani, D., Yudianto, I., & Afiah, N. N. (2020). The Influence of Internal Control System, Information Technology Utilization, and Organizational Commitment on Government Accountability Performance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, *3*(2), 17–29.

Harun, H. (2020). Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *12*(2), 123–134.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Lestari, R., & Nurkhin, A. (2023). Determinant Factors of Local Government Financial Performance (Using Financial Condition Dimension as Indicator). *Indonesian Management and Accounting Research*, *20*(2), 335–360.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ke-4)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____. (2021). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mansur, A. A., Amirullah, S., & Ichsan, H. (2023). The Effect of Intergovernmental Revenue and Value Added Human Capital on Regional Government Financial Performance. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, *3*(1), 1–11.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303–318.

Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *16*(2), 299–310.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. (2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Tiara Sedek, S. C. B., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 9081–9100.

Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, *9*(1), 30–37.